

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

"Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa - Kota"

Universitas Andalas

Padang, 23-24 November 2016

Kerjasama antara :

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan

Program Pascasarjana Universitas Andalas



Penyunting:

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG. 2017

ISBN : 978-602-73463-1-4

Rudi Febriamansyah
Melinda Noer
Zednita Azriani
Hasnah
Nuraini Budi Astuti

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa - Kota

Padang,
23-24 November 2016

**Kerjasama antara:
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI),
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan
Program Pascasarjana Universitas Andalas**

Penyunting:
Rudi Febriamansyah
Melinda Noer
Zednita Azriani
Hasnah
Nuraini Budi Astuti

**Program Pascasarjana Universitas Andalas
Padang
2017**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota

Padang

23-24 November 2016

Penyunting:

Rudi Febriamansyah

Melinda Noer

Zednita Azriani

Hasnah

Nuraini Budi Astuti

Pelaksana Teknis:

Siska Handayani

Anugrah Sri Widiasyih

Eki Amnur Hadi

Cut Mutiani

Desain Cover :

Siska Handayani

Gambar pada cover disumbangkan oleh Nurul Surya dan Anggun Putri Ayu

Diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2017

Oleh Program Pascasarjana Universitas Andalas

Limau Manis, Padang, Sumatra Barat

Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rudi Febriamansyah, dkk.

Prosiding Seminar Nasional

Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota

Penyunting : Rudi Febriamansyah, Melinda Noer, Zednita Azriani, Hasnah, Nuraini Budi Astuti.

Program Pascasarjana Universitas Andalas: Padang. 2017

828 hlm +xvi: 21 x 29,2 cm

ISBN : 978-602-73463-1-4

KATA PENGANTAR

KETUA ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI)



Selamat dan terima kasih kepada Program Pascasarjana, Universitas Andalas, yang telah berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan sukses. Setiap tahun Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan seminar nasional dengan bekerjasama dengan universitas dan beberapa pihak terkait. pada November 2016, seminar nasional telah berhasil diselenggarakan dengan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai tuan rumah dan Perhepi.

Tema Seminar tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota sangat tepat dipilih. Pembangunan desa-kota perlu dilihat secara terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dan kebijakan. Walaupun inklusifitas pembangunan desa-kota bukan tema yang baru dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, tetapi isu tersebut sangat relevan untuk dibahas. Ketimpangan wilayah - yang salah satu contohnya - dalam bentuk ketimpangan desa kota merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang berarti.

Topik yang dibahas dalam seminar nasional ini cukup luas yang menggambarkan pembangunan desa-kota yang semakin kompleks. Selain pendekatan sektoral yang tetap digunakan dalam analisis, seperti sektor pertanian dan pariwisata, pendekatan aktor dan jaringan antar aktor digunakan pula dalam melihat perkembangan desa-kota. Hal ini menunjukkan cakupan minat dosen dan mahasiswa yang terus meluas dalam mengkaji relasi desa-kota.

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia telah dan akan terus menggelar seminar nasional tiap tahun sebagai media komunikasi dan pembelajaran kolektif mahasiswa dan dosen yang berminat pada kajian kota dan wilayah. Seminar ini juga menjadi media untuk mendorong *knowledge production* sehingga dunia perguruan tinggi di Indonesia dapat berkontribusi secara lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Implikasi kebijakan yang terdapat dalam banyak paper pada seminar ini juga dapat membantu perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan kota dan wilayah di Indonesia.

Terima kasih saya sampaikan pada Universitas Andalas, khususnya Program Pascasarjana, Panitia Seminar, PERHEPI, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara Seminar Nasional ini.

Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., PhD

KATA PENGANTAR KETUA UMUM PERHEPI



Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Pengurus PERHEPI Komda Padang atas keberhasilannya menyelenggarakan satu event Seminar Nasional yang dikerjasamakan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan Program Pascasarjana Universitas Andalas. Seminar Nasional yang mengambil tema Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota ini memang juga telah menjadi perhatian besar bagi para akademisi pembangunan pertanian, baik dari aspek ilmu ekonomi pertanian maupun aspek ilmu lainnya. Selama ini memang sama kita sadari bahwa model pembangunan desa (*rural development*) dan pembangunan kota (*urban development*) telah terlalu dibuat demikian eksklusif masing-masingnya. Pembangunan desa sering lebih dikonotasikan dengan pembangunan pertanian di perdesaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan baik di domestik perdesaan sendiri maupun kebutuhan ekspor ke perkotaan. Konteks eksklusif dari model pembangunan seperti ini pada akhirnya membuat semakin besarnya jurang perbedaan antara desa dan kota, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah urbanisasi atau berpindahnya penduduk desa ke perkotaan pada akhirnya telah menjadi persoalan besar dari ketidakterpaduan model pembangunan seperti ini.

Pertemuan antara para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian dan para akademisi dari sekolah perencanaan pembangunan dalam Seminar Nasional ini merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu dikembangkan lebih jauh lagi dalam usaha menjawab berbagai permasalahan tersebut. Seminar Nasional yang telah menghadirkan lebih dari 150 orang peserta serta mengkompilasi lebih dari 90 buah makalah penelitian dengan berbagai tema terkait dengan perencanaan pembangunan desa-kota dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari masalah sumberdaya alam, pariwisata, produksi dan pemasaran produk pertanian dan lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan maupun untuk penelitian lebih lanjut.

PERHEPI sebagai satu perhimpunan bagi para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian di Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya penyebaran hasil kajian dan hasil pemikiran dari para anggotanya dalam berbagai bentuk forum ilmiah, baik yang diselenggarakan secara khusus dalam lingkungan PERHEPI sendiri maupun berbentuk kerjasama dengan organisasi profesi lainnya yang mempunyai visi dan misi yang searah dalam upaya menjawab berbagai masalah pembangunan pada umumnya atau masalah pembangunan pertanian pada khususnya.

Akhir kata, kami, Pengurus Pusat PERHEPI, sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini, terutama rekan-rekan ASPI, Program Pascasarjana Universitas Andalas, serta Pengurus PERHEPI Komda Padang. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada, Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kepada seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.

Dr. Bayu Krisnamurthi

TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA-KOTA: CATATAN DARI PENYUNTING

Hingga saat ini, permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih berputar disekitar masalah yang dilematik antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tinggi, diatas 5% per tahunnya, sementara walau memang menurut catatan BPS tahun 2017 penurunan kemiskinan telah cukup besar (sekitar 2,5 jt orang per tahun), jumlah penduduk miskin (baik di perkotaan maupun perdesaan) ternyata juga masih cukup besar, sebanyak 27.76 juta orang. Sejojyanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antar penduduk. Data terakhir dari BPS mencatat bahwa selama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kesenjangan, dengan ditandai oleh menurunnya Gini ratio sebesar 0.01 poin.

Diskursus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antara desa dan kota juga telah menjadi sorotan bagi para pengamat pembangunan. Sehingga dalam satu dekade terakhir ini, konsepsi pembangunan di Indonesia juga mulai diarahkan kepada konsepsi pembangunan yang inklusif, yang dapat mengangkat taraf hidup orang-orang ataupun wilayah yang selama ini relatif tertinggal. Sejumlah strategi dan pendekatan telah banyak dilakukan baik pada tingkat mikro dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan sosial dan perlindungan lainnya, maupun dukungan kebijakan makro yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan, pertanian, ataupun sektor hulu lainnya yang berintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan sektor hilirnya.

Seminar Nasional ini telah berupaya mengangkat permasalahan kesenjangan ekonomi dalam pembangunan desa dan kota selama ini, dengan mengajak peneliti dari berbagai aspek bidang ilmu; sosial, ekonomi, sains dan teknologi untuk bersama menemukan pokok-pokok pemikiran dalam membangun desa dan kota secara inklusif dan terintegrasi. Lebih dari 90 makalah yang tercakup dalam 6 tema utama telah dibahas dalam seminar ini, termasuk juga makalah dari para pembicara panel. Pembahasan makalah mencakup kajian terhadap aspek perencanaan pembangunan dalam arti luas, mulai dari kajian terhadap perencanaan program pembangunan itu sendiri maupun kajian atau evaluasi dari implementasi ataupun dampak dari proses pembangunannya.

Konsep-konsep dasar pemikiran tentang perencanaan pembangunan telah digaribawahi oleh para pembicara panel yang diundang dalam Seminar ini. Secara umum panelis menyoroti bahwa paradigma pembangunan inklusif harus dijadikan pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan di perdesaan dan perkotaan. Berbagai pengalaman panelis di wilayah studinya masing-masing telah mengungkapkan fakta empirik bahwa perencanaan pembangunan yang lebih mengikutsertakan peran pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik.

Sementara dari sejumlah makalah yang tercakup dalam 6 (enam) tema utama seminar ini, secara umum dapat diberi catatan sebagai berikut:

Tema A: Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Industri Kreatif

Sebanyak 19 (sembilan belas) makalah yang telah dibahas dalam tema ini, pada umumnya mengungkap berbagai fakta empirik tentang berbagai potensi ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan yang tentu saja menjadi produk konsumsi masyarakat perkotaan, seperti objek kawasan wisata baru, industri-industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan lokal, bahkan karya-karya seni masyarakat perdesaan.

Sejumlah model pendekatan perencanaan pengembangan kawasan wisata telah diungkap oleh para penulisnya, mulai dengan konsepsi kajian SWOT, pemanfaatan analisa spasial serta juga pelibatan partisipasi masyarakat. Secara umum, para peneliti pada dasarnya melihat bahwa peran serta masyarakat lokal menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap langkah kegiatan pengembangan di sektor ini, terutama sekali dimulai dalam tahap kegiatan perencanaan pengembangan itu sendiri. Sementara peran pihak luar, terutama pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pemikiran dan kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal ini, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Tema B: Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Lahan merupakan faktor utama dan bagian terpenting dari pengembangan pembangunan pertanian. Perencanaan dan pengembangan lahan sangat diperlukan karena keterbatasan sumberdaya lahan serta semakin besarnya kepentingan penggunaan lahan, tidak hanya bagi aktivitas pertanian tetapi juga aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya di luar sektor pertanian. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Aspek-aspek perencanaan dan pengembangan lahan yang berkelanjutan

perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam, untuk mendapatkan kesesuaian penggunaan lahan dengan tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Dari sepuluh makalah dalam tema ini, pembahasan makalahnya mencakup masalah upaya pemanfaatan lahan dan analisis kebutuhan lahan pertanian, diversifikasi penggunaan lahan serta konservasi lahan, sumberdaya manusia dan kesiapan masyarakat dalam penggunaan lahan, bencana alam yang berhubungan dengan penggunaan lahan, serta perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang dikaitkan dengan pengembangan agroindustri. Dari berbagai topik dari makalah-makalah tersebut, sebagian besar telah menyinggung tentang perencanaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, namun upaya konkrit yang berhubungan dengan keberlanjutan tersebut belum terlalu dibahas. Masalah kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah belum banyak disinggung dalam makalah yang ada.

Beberapa point penting yang mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan topik ini antara lain: pemetaan lahan pertanian yang berkelanjutan antar daerah, kajian evaluasi dan efektifitas kebijakan pengembangan lahan yang ada dihubungkan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Perencanaan dan pengembangan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pembiayaan yang berhubungan dengan pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan, serta berbagai topik yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Tema C: Perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman

Perkembangan kota di pinggiran pantai berpengaruh sangat besar terhadap kawasan pesisir dan kemaritiman, terutama terjadinya modifikasi dan rusaknya ekosistem pantai dan kemaritiman. Hal lain bahwa adanya kecenderungan tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang masih rendah dan rendahnya sumberdaya manusia di kawasan ini, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kondisi fisik kawasan pesisir. Perhatian khusus dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tercipta pembangunan yang mampu menjaga kelestarian alam pesisir secara berkelanjutan.

Makalah yang dipresentasikan dalam tema ini mencakup beberapa kajian seperti, kajian daya dukung lahan di kawasan pesisir, kajian pengembangan konsepsi agribisnis minapolitan, kajian pola penggunaan lahan di kawasan pesisir, serta kajian place-based management yang bersifat eco-region dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Dari kajian-kajian tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak sisi kajian empirik tentang pengelolaan lahan di kawasan pesisir yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tema D: Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Masalah degradasi sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan telah menjadi sorotan para pemakalah seminar ini, terutama yang berkaitan dengan masalah sumberdaya lahan pertanian, bencana alam, longsor, serta masalah lingkungan perumahan dan permukiman. Walaupun dalam setiap aspek pembangunan selalu ada kajian AMDAL-nya, tetapi pada kenyataannya masih banyak fakta empirik dari kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun pengembangan wilayah yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut.

Para penulis makalah dalam tema ini pada umumnya telah mengekspos perkembangan baru dalam pengembangan wilayah dimana keterlibatan masyarakat lokal telah dijadikan faktor penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Sisi inklusif dalam pelibatan masyarakat yang selama ini terpinggirkan telah mulai banyak dikembangkan di berbagai aspek pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan, seperti yang telah disampaikan oleh banyak pemakalah antara lain dalam pengelolaan sampah, pengembangan kawasan wisata, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan lainnya.

Tema E: Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi pembinaan dan penyelenggaraan perumahan, pembinaan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan penurunan kualitas dan upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terkait dengan itu, perencanaan perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa terlepas dari persoalan penyediaan tanah (lahan), pendanaan dan sistem pembiayaan, serta keterlibatan peran masyarakat berdasarkan sosial budayanya. Perumahan dan kawasan permukiman direncanakan dan diselenggarakan guna mendapat kepastian hukum, mendukung penataan ruang dan pengembangan wilayah, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam berwawasan lingkungan, memberdayakan pemangku kepentingan (*stakeholders*), menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta menjamin mutu rumah agar layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terpadu dan berkelanjutan.

Para penulis makalah yang dipresentasikan dalam tema ini telah menyajikan beberapa pemikiran, hasil studi literatur dan penelitian, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan terkait perumahan dan permukiman yang diimplementasi di daerah, baik di wilayah perkotaan atau perdesaan, terutama pada era desentralisasi. Diskusi yang menarik diantaranya adalah ketika kebijakan dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ternyata belum maksimal memenuhi unsur pemberdayaan *stakeholders* dan pelibatan masyarakat dalam hal meningkatkan kesadaran penggunaan sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan. Sejauh mana kebijakan pembangunan perumahan dengan pola vertikal karena keterbatasan jumlah lahan perumahan, sesungguhnya telah menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasaan kepada penghuninya. Khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah juga telah membangun perumahan dan kawasan permukiman baru, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Beberapa kasus pembangunan perumahan dan permukiman di kota besar dan menengah yang berdampak pada terbentuknya kawasan kumuh, telah memberikan pembelajaran bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan pelibatan masyarakat sejak perencanaan awalnya.

Selain itu, kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu direvitalisasi melalui pemberdayaan struktur lembaga dan *stakeholders*, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak berakibat kepada penurunan kenyamanan dan kualitas hidup penghuni kawasan. Peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang wilayah diimplementasi melalui proses perizinan mendirikan bangunan, membangun perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan lintas sektor dan organisasi / unit pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal itu tentu saja perlu dimulai dengan menata ruang wilayah, yang mencakup merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan ruang wilayah di tingkat pusat, daerah dan lokal dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tema ini juga mendiskusikan beberapa persoalan pembangunan sebagai dampak dari pembangunan kawasan komersial di lingkungan perguruan tinggi negeri yang berstatus kampus pemerintah, pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, serta evaluasi program bedah rumah untuk MBR. Selain itu, juga dibahas tentang konsep *green development* sebagai solusi permasalahan perkotaan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan melalui keterpaduan strategi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan sosial yang melibatkan semua aktor kunci pembangunan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang ideal, diperlukan koordinasi yang baik dan terpelihara dalam paradigma perencanaan partisipatif berbasis rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*) agar tercapai pemahaman yang sama antarpelaku dan aktor kunci pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta pelaku bisnis.

Sesuai tema pokok seminar nasional "*Perencanaan dan Pembangunan Inklusif Desa-Kota*", makalah dan diskusi dalam sub tema "*Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman*" telah mampu mengisi dengan beberapa pemikiran dan solusi terkait sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutan perumahan dan kawasan permukiman di desa dan kota. UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasaan kepada penghuninya. Oleh sebab itu perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman selalu mengikuti dinamika penghuninya.

Tema F: Kemiskinan dan Ketimpangan

Dari makalah yang dikelompokkan ke dalam Tema F ini tidak semua berkaitan dengan isu kemiskinan dan ketimpangan. Sebagian besar makalah lebih berkaitan dengan isu pembangunan wilayah. Kajian kemiskinan berdasarkan artikel yang masuk didapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan di suatu wilayah yaitu, (a) pembangunan infrastruktur, (b) pendapatan regional, dan (c) Jumlah penduduk

Satu makalah secara khusus membahas tentang kerangka penetapan rumah tangga Miskin oleh BPS, yang selama ini belum memasukkan variabel ekonomi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara beberapa yang lainnya mengkaji beberapa masalah seperti masalah waktu luang dalam rumah tangga, karakteristik kemiskinan berdasar kawasan, kajian ketimpangan yang berkaitan dengan indikator demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia, serta kajian hubungan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan. Apabila diperhatikan lebih lanjut, sejauh ini kajian mengenai ketimpangan belum memasukan bahasan mengenai pengaruh sektor industri, jasa dan perdagangan dalam melihat ketimpangan antar wilayah.

Sebagai penutup, seluruh makalah, baik dari panelis dan juga seluruh tema yang telah dikompilasi dalam buku proseedings ini, setidaknya telah menghasilkan dua hal pokok yang sangat berarti bagi pengembangan praktis dan konseptual lebih lanjut, yang menjadi tantangan ilmu perencanaan dalam pembangunan khususnya. Secara konseptual, pembangunan inklusif setidaknya menuntut pendekatan yang lebih humanistik, yang secara khusus harus lebih dapat

mentransformasi manusia dan masyarakat lebih awal sebelum adanya perubahan atau transformasi fisik yang justru akan merubah kondisi masyarakat ke arah yang tidak diharapkan. Untuk itu, konsepsi ilmu perencanaan ke depan semakin membutuhkan keterpaduan keilmuan yang lebih komprehensif, terutama dengan bidang ilmu sosial dan kemasyarakatan. Secara praktis, kerangka-kerangka metodologi dan pendekatan praktis yang biasa dipakai dalam ilmu-ilmu sosial dan kemasyarakatan harus semakin dapat dipadukan dengan model-model teknis perencanaan yang saat ini juga sedang berkembang. Sejumlah makalah telah mulai mengeksplor kerangka praktis ini, namun masih harus terus dapat disempurnakan dan dikembangkan. Selanjutnya, pada sisi yang lain, seminar ini juga mencoba menggiring pemikiran bahwa konteks pembangunan desa dan kota, tidak lagi harus dilihat secara terpisah, tetapi harus dilihat keterpaduannya untuk dapat berkembang dan bertransformasi bersama.

Akhir kata, kami sangat berterimakasih sekali kepada seluruh panelis dan pemakalah Seminar Nasional ini yang telah melengkapi dan menyempurnakan seluruh makalahnya sesuai dengan format penerbitan proseedng ini. Semoga seluruh hasil karya dan pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, para akademisi, birokrat dan praktisi perencanaan dan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

Padang, Juni 2017

Tim Penyunting

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua ASPI.....	iii
Kata Pengantar Ketua PERHEPI.....	iv
Tantangan Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota:Catatan Dari Penyunting	v
MAKALAH PANEL	
Desa-Kota sebagai Alternatif Permukiman yang Berkelanjutan: Pembelajaran dari Yogyakarta dan Bali Boby Setiawan	1
Perencanaan Organik: Mengatasi Kemajemukan dan Liberalisasi Pasar Endry Martius	11
Pengembangan Wilayah Berbasis <i>Quadruple Helix</i> : Analisis Jaringan Antar Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif Cimahi Tubagus Furqon Sofhani dan Vauli Nurrahma	17
Pelajaran dari Praktik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Werry Darta Taifur	27
TEMA A : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRI KREATIF	
Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung Trawas Kabupaten Mojokerto Anak Agung Sagung Alit Widiyastuty dan Gesang Hari	35
Model Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar I Gusti Putu Anindya Putra	43
Membangun Kampung Kreatif Melalui Kolaborasi Mahasiswa dengan Masyarakat: Kasus: Kawasan Balubur-Tamansari Kota Bandung Asep Yudi Permana, Nana Sumarna dan Karto Wijaya	51
Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort sebagai Kawasan Ekowisata dan Wisata Olahraga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desy Aryanti dan Harne Julianti Tou	59
Risiko Produksi Pembenihan Lele pada Usaha Family Pisces Group Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Dwi Evaliza, Nur Afni Evalia dan Elfi Syukrina Sani	79
Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Eko Budi Santoso, Arwi Yudhi Koswara dan Belinda Ulfa Aulia	87
Pengembangan Kelembagaan Koperasi Melalui Perspektif Psikologi Sosial Elfi Rahmadani, Rudi Febriamansyah dan Ira Wahyuni Syarfi	93
Pengembangan Air Terjun Coban Pelangi Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang Berdasarkan Potensi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Ema Umilia, Ketut Dewi Martha Erli Handayani dan Arwi Yudhi Koswara	103
Implementasi Nagari Koto Hilalang sebagai Desa Wisata Pertanian di Kabupaten Solok Harne Julianti Tou	111
Analisis Program Pengembangan Ekowisata di Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Hendro Muliarto, Isye Nurhasanah Susanah dan Citra Persada	115

Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi – Provinsi Jawa Barat Hilwati Hindersah, Yulia Asyiwati, Lely Syiddatul Akliyah dan Taufik Akbar Ramadhan	125
Pengembangan Agro-Technopark untuk Mendukung Agrowisata Salak Sibetan Berkelanjutan I Ketut Sumantra	135
Pengembangan Klaster Industri Kerajinan Mutiara, Emas, Perak (MEP) sebagai Kawasan Pariwisata Belanja di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Ima Rahmawati Sushanti, Baiq Harly Widayanti dan Sucia Wulandari Irawan	141
Perkembangan Wisata Berbasis Sosial Media dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur Perdesaan Isti Hidayati	153
Pengembangan Industri Kreatif Pedesaan Melalui Komersialisasi Produk Unggulan Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam) Lora Triana dan Faidil Tanjung	161
Menakar Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Losari Sebagai Ruang Publik Slamet Trisutomo, Mukti Ali dan Nuni Andriani Daunun	169
Identifikasi Kebutuhan Ruang untuk Pengembangan Wisata Budaya Seni Pertunjukan Tradisional (Studi Kasus : Kota Bandung) Sony Herdiana dan Khaerunnisa Larashati Mahmud	177
Model Pengembangan Industri Kelapa di Provinsi Riau Syaiful Hadi	183
Penentuan Hirarki Pengembangan Wilayah pada Pulau-Pulau Kecil Berpotensi Wisata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tondobala Linda, Cynthia Wuisang dan Leidy Rompas	191
TEMA B : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	
Peranan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kelas Berkembang dalam Pengembangan Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Tebo Asnawati. Is	201
Diversifikasi Sawah Melalui PTS Iptek bagi Masyarakat Arief Setiyawa, Hutomo Moestadjab dan Gaguk Sukowiyono	209
Pemetaan Lokasi Konservasi untuk Penyelamatan Stok Ternak Delvia Nora	215
Dampak Bencana Alam terhadap Sektor Pertanian di Perdesaan di Provinsi Jawa Barat Dwi Mahroji	225
Kontribusi Sektor Pertanian di Subsektor Perkebunan terhadap Ekonomi Kabupaten Tebo Evo Afrianto	233

Analisis Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Pangan sebagai Dasar Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan Hasbullah Syaf, M.Tufaila, Lukman Yunus, La Baco, Jufri Karim dan M.Aris Rauf	243
Pengembangan “Kampung Bibit” sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pertanian Organik Perkotaan (Studi Kasus: RW 3, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang) Aris Subagiyo, Abdul Wahid Hasyim dan Armei Rapudin	251
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Anshar dan Patris	257
Analisis Kesiapan Masyarakat Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dalam Program Pencetakan Sawah Baru Nuraini Budi Astuti, Ira Wahyuni Syarfi dan Edwin	275
Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah Pertanian terhadap Pengembangan Agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota Rini Hakimi, Melinda Noer, Nofialdi dan Hasnah	281
TEMA C: PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN KEMARITIMAN	
Kajian Daya Dukung Lahan terhadap Tekanan Penduduk di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Fitriana Syahar	289
Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai dengan Konsep Agribisnis Minapolitan Mohammad Agung Ridlo	301
Karakteristik Pola Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Makassar (Studi Kasus Delta Sungai Jeneberang) Mukti Ali, Slamet Trisutomo, Sri Aliah Ekawati dan Resti Kharisma	309
Place-Based Management sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Ruang Laut di Indonesia Putu Oktavia	319
TEMA D : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	
Eksplorasi Pola Hidup Masyarakat Bugis sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Inklusif Perumahan dan Permukiman di Kota Makassar Arifuddin Akil	327
Valuasi Sumber Daya Lahan di Pinggiran Kota Malang (Studi Kasus : Wilayah Pinggiran Kota Malang, Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Dimas Wisnu Adrianto, Abdul Wahid Hasyim, Dian Dinanti, Januar Dwi Hari Sandy dan Raihanah Rizky Ananda	335
Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3r di Kota Bukittinggi Dona Amelia dan Juarsa Badri	343

Pengembangan Desa Berkelanjutan Melalui Konsep Mandiri Energi di Desa Parakanmuncang Kabupaten Bogor Eneng Dayu Saidah dan Indarti Komala Dewi	353
Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Wilayah Berbasis Pangan Lokal Sagu, Keladi dan Pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai Erwin	373
Analisis Resiko Bencana Multi Bahaya (<i>Multi Hazard</i>) dan Arahan Mitigasinya di Kota Bukittinggi Firmansyah, Jajan Rohjan dan Deden Syarifudin	
Evaluasi Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kawasan Permukiman di daerah Aliran Sungai (Das) Ciliwung Hulu Indarti Komala Dewi dan Faisal Abdi	381
Peranan Tanah Ulayat sebagai <i>Land Banking</i> dalam Perkembangan Kota Bukittinggi Ira Safitri Darwin, Haryo Winarso dan Denny Zulkaidi	389
Analisis Potensi Sumber Daya Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Industri Perkotaan Baru Bumi Asri Dusun Tengah untuk Mempercepat Pembangunan Solok Selatan sebagai Daerah Tertinggal di Sumatera Barat Kardiman	397
Kawasan Banjir dan Pola Aliran Sungai Berdasarkan Morphometri pada Daerah Aliran (DAS) Batang Kuranji Sumatera Barat Lusi Utama, Amrizal Saidi, Isril Berd dan Zuherna Mizwar	409
Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita sebagai Sarana Pilihan Angkutan Umum di Provinsi Bali Ni Nyoman Rai Sriasih dan Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih	421
Model Penggunaan Lahan Berbasis Budaya di DAS Tukad Pakerisan Bali Nyoman Utari Vipriyanti	425
Water Poverty Index di Kecamatan Kedungkandang Septiana Hariyani dan Ismu Rini Dwi Ari	431
Pemanfaatan Poster Y untuk Mengeksplorasi Gagasan Mahasiswa Perencanaan Pembangunan Wilayah dalam Mengelola Kawasan Lanskap Budaya Dunia Sang Putu Kaler Surata	441
Kearifan Budaya Lokal Kampung Adat Cireundeu dan Konsep Swasembada Pangan Saraswati dan Reiza Permada Gulfa	451
Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pekerisan Ditinjau dari Daya Dukung Biofisik Lahan Wayan Sudiani dan I Ketut Sumantra	459

TEMA E: PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Studi Awal Tingkat Kepuasan Penghuni Rusun Jatinegara Barat di DKI Jakarta dan Kesempatan Pengentasan Kemiskinan

Akhmad Gunawan, Haryo Winarso dan Teti Armiati Argo..... 469

Perubahan Ruang Sakral Wilayah Kuta, Bali

Ari Djatmiko dan Zulphiniar Priyandhoko..... 477

Strategi Penyediaan Kawasan Komersial di Lingkungan Kampus ITS Surabaya

Arwi Yudhi KOSWARA, Sardjito dan Adjie PAMUNGKAS..... 483

Kebijakan Pengembangan Area Permukiman Melayu Moderen di Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau

Fiki Angga Putra dan Puji Astuti..... 493

Spiritualitas Ruang Tongkonan Kampung Adat Tua Sillanan – Toraja

Imam Indratno, Sudaryono, Bakti Setiawan Dan Kawik Sugiana..... 507

Pengelolaan Permukiman Berkelanjutan di Kawasan Pinggiran Metropolitan Jabodetabek

Janthy Trilusianthy Hidayat 515

Kajian Potensi Ekonomi Wilayah dan Penguatan Kelembagaan untuk Mendorong Pembagunan Kawasan Transmigrasi di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa Provinsi

Lilis Sri Mulyawati dan Inna Sri Supina Adi 521

Kajian Penataan Eksistensi Kampung Terjepit (*Enclave*) Akibat Pengembangan Perumahan Skala Besar (Studi Kasus Kampung Lengkong Ulama Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang)

Medtry, Budi Haryo dan Kusmalinda Madjid..... 531

Kebijakan Pengendalian Ruang Perumahan dan Pemukiman di Kota Padang: Studi Kasus Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Pauh Kota Padang

Melinda Noer, Rian Hidayat dan Yushy 541

Pengaruh Struktur Ruang Berdasarkan Tataguna Lahan Campuran (Mix Used) di Kota Banda Aceh

Noer Fadhly, A. Rahim Matondang Sirojuzilam dan Sofyan M. Saleh 549

Kajian Dampak Perkembangan Permukiman Berdasarkan Debit Air Limpasan di Kecamatan Medan Johor

Rahmad Dian dan Muhamad Abdul Soleh 555

Green City: Solusi Problematika Perkotaan dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Syarif Imam Hidayat 567

Analisis Laju Pertumbuhan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana Kota Bukittinggi

Tri Novi Arif, Melinda Noer dan Yossyfra 577

Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang

Yushy, Yossyfra dan Melinda Noer 589

TEMA F: KAJIAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

Ketimpangan Pendapatan dan Demokrasi Indonesia: Fakta dari Non-Linear Estimasi Gmm

Abdul Khaliq	599
Integrasi Pembangunan Desa-Kota Menuju Kemandirian Pangan dan Masyarakat Sejahtera Asep Suherman	611
Identifikasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Publik berdasar Aspek Penyediaan (<i>Supply Aspect</i>) (Studi Kasus: Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang) Deni Agus Setyono, Denny Dwi Cahyono dan Dian Kusuma Wardhani	619
Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kota Padang Panjang) Eliza dan Siska Yulia Defitri	629
Transformasi <i>Technopark</i> Menuju <i>Technopolis</i> : Sebuah Pengalaman Pengembangan Technopark di Indonesia Ery Supriyadi Rustidja dan Tuti Karyani	641
Analisis Ketimpangan Pembangunan Sumatera Utara Faoeza Hafiz Saragih dan Endang Sari Simanullang	649
Resettlement, Partisipasi, Kompensasi dan Kesejahteraan Masyarakat Fery Andrianus, Syafruddin Karimi, Melinda Noer dan Werry Dartta Taifur	655
Kegagalan Pembangunan Pertanian Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Indonesia Gevisioner, Rudi Febriamansyah, Ifdal dan Suardi Tarumun	663
Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin Melalui Pemanfaatan Waktu Luang Istri di Kawasan Perdesaan (Kasus : Kabupaten Bekasi) Ina Helena Agustina	671
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Gabungan Kelompok Tani Tanjung Sehati dalam Kegiatan Kelompok di Kabupaten Merangin Isyaturriyadhah, Asnawati Is dan Effy Yudiawati	683
Analisis Wilayah Komoditi Basis dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Regional Kabupaten Dharmasraya Joni Haryadi, Melinda Noer dan Hery Bachrizal Tanjung	691
Identifikasi Pusat - Pusat Pelayanan dengan Analisis <i>Weighted Centrality Index</i> (Studi Kasus Kabupaten Bogor) Ken Martina Kasikoen, Darmawan Listya Cahya dan Laili Fuji Widayawati	697
Mobilitas Pencari Kerja Perempuan di Perkotaan Komara Djaja, Hera Susanti, Shelly Adelina dan Cita Wigjoseptina	703
Peran Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari Berbasis Ikatan Sesama Petani terhadap Pembangunan Pedesaan di Nagari Balai Panjang Muhamad Reza, Melinda Noer, Yonariza dan Asmawi	711
Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi Kasus : Desa Semukut-Kab. Kep. Meranti) Muhammad Sofwan	721
Interaksi Lintas Batas Antar Negara dalam Pendekatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu-Kalbar) Muhamad Yogie Syahbandar	731
Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Kemiskinan Kota Tangerang Resti Meliana Sari, Ikhmaliska Aisha Maqdis dan M. Yogie Syahbandar	737

Inventarisasi Lembaga Keuangan Lokal dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pauh Kota Padang Rika Hariance, Zednita Azriani, Cindy Paloma, Yuerlita dan M Refdinal	747
Kajian Perkembangan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Siti Abir Wulan	755
Kajian Penghidupan Rumah Tangga di Kabupaten Padang Pariaman Pasca Gempa 2009 (Studi Kasus Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan) Sosmiarti, Syafruddin Karimi, Melinda Noer dan Werry Darta Taifur	761
Badan Usaha Milik Desa: Mengidentifikasi Potensi, Peluang dan Tantangan Teguh Widodo	771
Mengawal Pembangunan Neo-Endogenous di Perdesaan: Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab Serang Teti A Argo dan Hastu Prabatmojo	775
Mentautkan Desa-Kota Melalui Penerapan <i>Supply Chain Financing</i> pada Komoditas Wortel di Koperasi Al-Ittifaq Tuti Karyani, Nabila Luthfiannisaa dan Ery Supriyadi.R	783
Model Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Umar Mansyur	793
Pembangunan Inklusif Desa-Kota Melalui Pengembangan Kawasan Agropolitan Wiwik Ambarsari	805
Local Economic Linkages pada Kota Kecil/Menengah sebagai Instrumen Konsep Keterkaitan Desa-Kota (Rural-Urban Linkage) Yosep Mohamad Holis	817
LAMPIRAN	827
Lampiran 1 Panitia Pengarah	827
Lampiran 2 Panitia Pelaksana	828

MENTAUTKAN DESA-KOTA MELALUI PENERAPAN *SUPPLY CHAIN FINANCING* PADA KOMODITAS WORTEL DI KOPERASI AL-ITTIFAQ

Tuti Karyani¹⁾, Nabila Luthfiannisa¹⁾ dan Ery Supriyadi.R²⁾

¹⁾²⁾ Faperta Unpad,

²⁾ Ikopin

Email: tutikaryani23@gmail.com

Naskah diterima : 2 Maret 2017 Naskah direvisi: 24 Maret 2017 Disetujui terbit : 27 Maret 2017

ABSTRAK

Koperasi Al-Ittifaq adalah unit usaha agribisnis yang menjadi supplier tetap beberapa supermarket besar yang berada di Bandung dan Jakarta. Permasalahan yang terjadi pada koperasi ini adalah lamanya jangka waktu pembayaran dari supermarket sehingga merugikan koperasi dan petani. Hal ini yang mendasari koperasi menerapkan model supply chain financing (SCF) pada wortel yang difasilitasi oleh Bank BNI 46. Keterkaitan antara Koperasi Al-Ittifaq dengan Supermarket yang difasilitasi BNI ini merupakan bagian dari upaya mentautkan desa dengan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari model SCF bagi koperasi dan petani wortel. Penelitian dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Desain penelitian yang digunakan adalah de sains kualitatif, dengan teknik studi kasus. Penentuan sumber data ditentukan dengan sengaja menggunakan teknik bola salju. Informan dalam penelitian ini terdiri atas petani dan pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan alat analisis deskriptif dan value stream mapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok wortel ini mampu mentautkan desa dan kota melalui hubungan aliran produk, aliran uang dan aliran informasi. Implementasi Model SCF wortel ini bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia dan Lion Super Indoyang berdampak positif bagi petani karena jeda waktu pembayaran dari koperasi menjadi singkat juga, yaitu satu minggu.

Kata kunci : *Mentautkan desa-kota, Model Supply Chain Finance, Koperasi Al-Ittifaq*

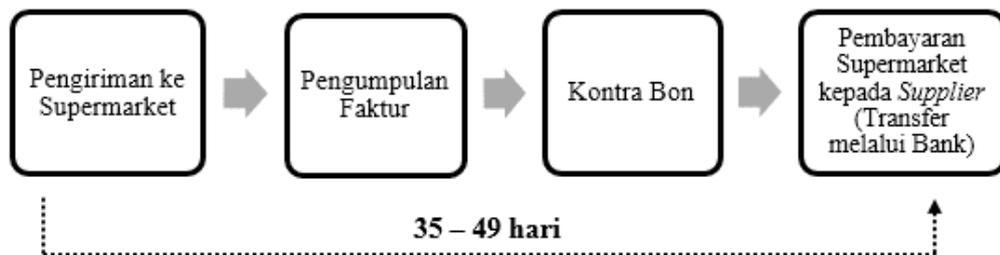
PENDAHULUAN

Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu daerah pemasok sayuran untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri, hal ini disebabkan karena iklim Jawa Barat yang sejuk dan kondisi tanah yang kaya akan unsur hara menjadi faktor pendukung kesuksesan daerah Jawa Barat untuk menghasilkan tanaman sayuran dan buah yang berkualitas baik. Produk sayur dan buah dari Jawa Barat dapat dengan mudahnya ditemukan di pasar tradisional dan supermarket yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu sentra sayuran Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung dengan wortel sebagai salah satu komoditas unggulannya. Produktivitas wortel Kab. Bandung pada tahun 2014 sebesar 222,32 kwintal/ha.

Koperasi Al-Ittifaq merupakan Pondok Pesantren yang mengelola Koperasi yang mewadahi kelompok tani wortel yang berada di daerah sekitar Desa Alam Endah. Koperasi ini setiap harinyamensuplai permintaan wortel beberapa supermarket yang berada di daerah Bandung dan Jakarta. Jumlah sayuran wortel yang dikirimkan bergantung pada permintaan dari pihak supermarket. Saat ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq telah bekerjasama dengan empat supermarket besar yang berada di Bandung dan Jakarta, yaitu Lion Super lindo (LSI), Lottemart, Toserba Yogya, dan Griya.

Wortel baru dapat dikirimkan apabila telah terjadi kesepakatan harga jual antara pihak koperasi dengan pihak supermarket. Harga jual ini ditentukan oleh pihak koperasi yang kemudian diajukan kepada pihak supermarket. Perubahan harga dilakukan setiap dua minggu sekali. Ketika barang telah sampai di supermarket, pihak supermarket tidak akan langsung membayar pada hari itu juga, terjadi penundaan pembayaran. Pihak

supermarket baru akan membayarkan tagihannya pada bulan berikutnya. Berikut ini merupakan salah satu skema alur transaksi pembayaran dari Toserba Yogya dan Griya:



Gambar 1. Alur Transaksi Pembayaran dari Toserba Yogya dan Griya
 Sumber: Bayu, Kartib dan Sulistiyo, Dedi [1] (2010)

Padahal menurut Perdana dan Avianto dalam Karyani (2013) [2], aliran uang akan menentukan kelancaran dan kesinambungan dalam aliran produk. *Lead time* yang panjang membuat para petani mitra dan *supplier* tidak dapat bertahan dalam rantai pasok tersebut. Model *supply chain financing* (SCF) diharapkan membantu *supplier* dan petani untuk mempersingkat jeda waktu pembayaran yang dilakukan oleh supermarket.

Menurut Hoffman [3], *Supply Chain Financing* (SCF) adalah bagaimana mengelola modal kerja, arus kas antara perusahaan sepanjang rantai pasokan baik dalam bentuk pembayaran antara vendor dan pembeli atau dalam bentuk keuangan. Saat ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjalankan model *supply chain financing* (SCF) pada komoditas wortel yang berorientasi pada supermarket. Model pembiayaan ini bekerjasama antara Bank Negara Indonesia (BNI) dan Lion Super Indo (LSI). Pada tahun 2013 BNI yang merupakan sebuah lembaga keuangan memiliki program *supply chain financing*, kemudian menjalin kerjasama dengan supermarket LSI untuk membantu membayarkan tagihan yang dimiliki oleh LSI kepada para *supplier*. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai bagaimana proses bisnis pelaku bisnis pada pelaku pada rantai pasok wortel di Koperasi Al-Ittifaq serta implementasinya dan dampak yang ditimbulkan dari model pembiayaan *supply chain financing* (SCF), baik bagi koperasi mau pun bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses bisnis petani wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.
2. Implementasi dari model pembiayaan tersebut di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
3. Dampak yang ditimbulkan dari model *Supply Chain Financing* (SCF) bagi Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq dan petani wortel di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung,

Konsep Rantai Pasok dan Pembiayaan Rantai Pasok (*Supply Chain Financing*)

Kredit pertanian bukan sekedar sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian, akan tetapi berfungsi pula sebagai satu titik kritis pembangunan pertanian (*critical point of development*) [4]. Pada suatu rantai pasok terdiri atas lebih dari 2 pelaku, sehingga keperluan terhadap kredit atau pembiayaannya berbeda tergantung pada proses bisnisnya. Menurut Pujawan [5], rantai pasok adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ling Li [6] dan Vorst [7], menyatakan bahwa rantai pasok lebih menekankan pada semua aktivitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang di dalamnya terdapat aliran dan transformasi barang mulai dari bahan baku sampai ke konsumen akhir dan disertai dengan aliran informasi dan uang.

Supply chain financing adalah layanan yang diberikan oleh bank kepada *buyer* dan/atau *supplier* dalam rangka pembayaran atas pengadaan barang dan jasa kebutuhan operasional *buyer* kepada *supplier*. Menurut USAID [8], *supply chain financing* adalah produk keuangan dan jasa yang mengalir ke atau melalui setiap titik dalam rantai pasok dalam rangka meningkatkan pengembalian atas investasi dan pertumbuhan daya saing rantai pasok itu. Dengan pembiayaan rantai pasok, risiko dan pengembalian dari penyedia keuangan ditanggung bersama oleh pelaku dalam rantai pasok. SCF awalnya difokuskan pada lintas batas perdagangan timur-barat.

Hubungan antara pembeli dan pemasok sudah menjadi ciri khas sebuah kekuatan yang seimbang dalam hal mencari keuntungan sejak dahulu. Terdapat tiga komponen biaya yang menjadi fokus dalam *supply chain financing*, yaitu biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya logistik. Menurut KIT and IRR [9], menyebutkan bahwa komponen yang membentuk suatu rantai pembiayaan adalah *chain actor* dan *chain supporter*.

Berikut ini penjelasan mengenai kedua komponen tersebut:

1. Pelaku Utama Rantai Pasok (*Chain Actor*)

Chain actor adalah pihak yang memiliki komoditas dalam suatu rantai pasok. Selanjutnya KIT dan IIRR membagi *chain actor* kedalam duabagian, yaitu penjual (*the seller*) dan pembeli (*the buyer*). Setiap pelakudalam rantai pasok dapat menjadi penjual, pembeli, atau sebagai penjual dan pembeli.

2. Pelaku Pendukung Rantai Pasok (*Chain Supporter*)

Chain supporter adalah pihak yang tidak memiliki komoditas, namun hanya bertindak sebagai pelancar kegiatan dalam rantai pasok tersebut. Dalam *supply chain financing*, lembaga keuangan merupakan *chain supporter*.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah mentautkan desa-kota melalui penerapan *supply chain financing* (SCF) wortel pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang lokasinya di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Analisis Deskriptif untuk mendeskripsikan proses bisnis petani wortel dan aliran rantai pasok wortel di Koperasi Al-Ittifaq; 2) *Value Stream Mapping* (VSM) untuk mengetahui implementasi dan dampak yang ditimbulkan dari model SCF terhadap petani dan Koperasi Al-Ittifaq.

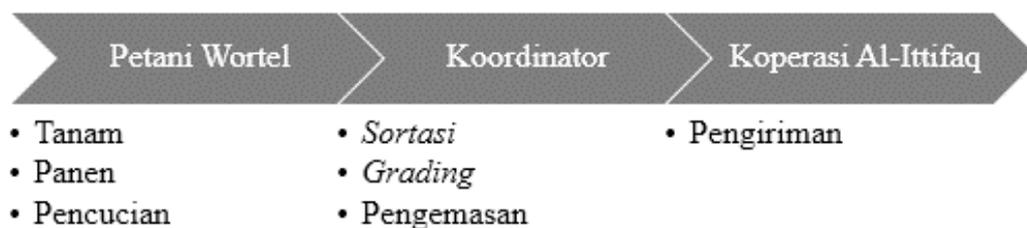
HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Petani Wortel di Koperasi Al-Ittifaq

Koperasi Al-Ittifaq memiliki dua gudang, yaitu gudang untuk Bandung dan gudang untuk Jakarta. Setiap gudang memiliki petani pemasoknya masing-masing dan terdapat koordinator yang bertanggung jawab terhadap pasokan wortel di kedua gudang tersebut. Peran koordinator dalam kegiatan usahatani wortel di Koperasi Al-Ittifaq adalah untuk menyediakan wortel sesuai dengan permintaan konsumen dan menjadi jembatan bagi petani yang akan memasok wortel ke koperasi. Koordinator yang bermitra dengan koperasi merupakan anggota koperasi.

Petani Wortel Untuk Supermarket Bandung

Berikut ini gambaran proses bisnis petani wortel untuk supermarket Bandung:



Gambar 2. Proses Bisnis Wortel di Gudang Bandung

Berdasarkan Gambar 2, petani wortel melakukan proses budidaya wortel mulai dari tanam hingga panen selama kurang lebih 120 hari. Setelah dipanen langsung dilakukan pencucian hingga bersih, kemudian wortel dibawa oleh petani ke rumah koordinator menggunakan mobil *pick up*. Proses selanjutnya setelah pencucian adalah proses *sortasi* dan *grading* wortel. Wortel dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori *baby* wortel, wortel curah, dan wortel barang sisa (BS).

Tabel 1. Kategori Wortel Untuk Gudang Bandung

Wortel Curah	Baby Wortel
Memiliki panjang 15 – 25cm.	Memiliki panjang ≤ 10 cm.
Tidak memiliki warna hijau pada pangkal wortel.	Tidak memiliki warna hijau pada pangkal wortel.
Tidak bercabang.	Tidak bercabang.
Tidak terdapat cacat pada fisik wortel.	Tidak terdapat cacat pada fisik wortel.
Segar.	Segar.

Wortel yang tidak termasuk ke dalam kriteria di atas, disebut BS. Yang jumlahnya sekitar 30% dari total keseluruhan wortel. Wortel selanjutnya dikemas sesuai dengan permintaan dari pihak supermarket, untuk *baby* wortel dikemas menggunakan plastik *wrap*. Wortel curah dikemas menggunakan kantong plastik dengan komposisi sesuai dengan yang tertera dalam *purchase order* dari supermarket. Wortel yang sudah dikemas kemudian dibawa ke gudang yang berada di koperasi untuk ditimbang jumlah pasokan pada hari tersebut dan dicatat ke dalam buku kas koordinator. Koperasi Al-Ittifaq membeli wortel curah dari koordinator dengan harga Rp 9.000/kg dan Rp 5.000/kg untuk *baby* wortel. Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq menerapkan sistem pembayaran tunda kepada para koordinator yang memasok produk ke gudang Bandung. Koordinator akan menerima uang hasil penjualan wortelnya satu minggu sekali yaitu setiap hari Jum'at. Jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh koperasi dapat dilihat di buku kas milik koordinator, karena seluruh koordinator yang bermitra dengan koperasi memiliki buku kasnya masing-masing.

Sistem pembayaran tunda yang diterapkan koperasi tidak terlalu memberatkan koordinator,. Hal ini dikarenakan pendapatan koordinator tidak hanya dari menjual wortel kepada koperasi, tetapi juga menjual wortel ke Pasar Induk Caringin, Bandung. Wortel-wortel yang masuk ke dalam kategori BS, dijual ke Pasar Induk Caringin. Sistem pembayaran di Pasar Induk Caringin adalah tunai, sehingga koordinator mendapatkan uang dari pasar untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

Petani Wortel Untuk Supermarket Jakarta

Gudang Jakarta memiliki sistem yang hampir sama dengan gudang Bandung dalam hal alur masuknya wortel ke gudang. Hal yang berbeda dari gudang Bandung adalah tugas koordinator disini hanya sebagai pencari wortel saja, tidak perlu melakukan *sortasi*, *grading* dan pengemasan. Alur proses bisnis untuk gudang Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3 :



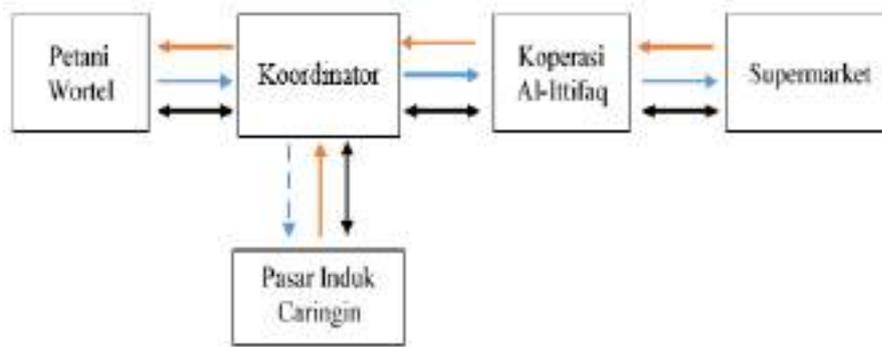
Gambar 3. Proses Bisnis Wortel di Gudang Jakarta

Berdasarkan Gambar 3, tugas seorang koordinator hanya mencari sayuran wortel yang siap panen kemudian membeli wortel tersebut dari petani wortel dengan harga Rp 2.000/kg. Proses panen dilakukan langsung oleh tiga orang pekerja yang dibayar dengan harga Rp 500/kg untuk satu timnya. Wortel yang sudah dipanen langsung dibawa ke gudang Jakarta yang berada di Koperasi. Wortel yang dijual ke koperasi dicuci, disortasi, di-*grading*, dan di kemas oleh santri-santri yang bekerja di koperasi bagian gudang Jakarta. Rata-rata pasokan wortel yang masuk ke gudang adalah 68 kg setiap harinya. Koperasi membeli wortel dari koordinator dengan harga Rp 5.000/kg, dengan kriteria wortel tersebut segar, tidak terdapat warna hijau pada pangkalnya, tidak bercabang dan berukuran 15 – 25 cm, dan tidak terdapat *baby* wortel.

Pola pembayaran yang diterapkan koperasi kepada koordinator wortel adalah pembayaran tunda, dengan jeda waktu satu minggu. Ini juga berlaku untuk seluruh petani dan koordinator yang memasok barangnya ke gudang Jakarta. Untuk gudang Jakarta, pembayaran dilakukan setiap hari Sabtu.

1. Rantai Pasok Wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan di lapangan, dapat ditemukan rantai utama dalam agribisnis wortel di Koperasi Al-Ittifaq



Keterangan:
 → Aliran Barang
 ← Aliran Uang
 ↔ Aliran Informasi
 - - - - - Wortel BS

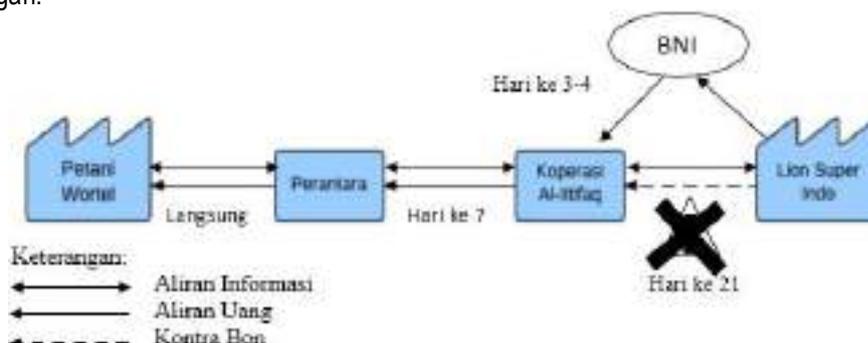
Gambar 4. Rantai Pasok Agribisnis Wortel di Koperasi Pondok Pesantren AI-Ittifaq

Aliran pertama adalah aliran barang yang mana dalam rantai pasok tersebut berupa wortel yang diawali dengan bentuk input produksi di tingkat petani, selanjutnya input ini diproses pada kegiatan budidaya yang hasilnya berupa wortel. Wortel yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan di tempat tinggal koordinator untuk dilakukan proses *sortasi*, *grading*, dan pengemasan. Wortel-wortel yang sudah terkumpul kemudian dikirimkan kepada supermarket Lottermart yang berada di Jakarta pada pukul 22.00 WIB menggunakan mobil *pick up* dan supermarket LSI yang berada di daerah Bandung pada pukul 05.00 WIB menggunakan mobil *box*. Aliran ini merupakan aliran yang bergerak dari desa ke kota. Desa Alam Endah ke kota Bandung dan Jakarta. Aliran kedua adalah aliran uang berupa transaksi yang terjadi antar pelaku rantai pasok. Aliran uang bergerak sebaliknya yaitu dari supermarket ke koperasi, lalu ke coordinator dan petani. Di sini terjadi aliran uang dari kota ke desa.

Aliran ketiga adalah aliran informasi yang merupakan faktor utama lancarnya arus aliran barang dan aliran uang. Aliran informasi bergerak dari dua arah, yaitu dari petani kepada supermarket dan dari supermarket kepada petani. Informasi yang bergerak dari petani kepada supermarket biasanya berupa jumlah produksi wortel yang dihasilkan petani, kebutuhan input produksi, harga yang berlaku dikalangan petani, kontrak kerja antara koperasi – supermarket, koperasi – koordinator dan koordinator – petani. Informasi yang bergerak dari arah hilir ke hulu atau dari supermarket kepada petani adalah *purchase order*, *purchase performance*, *service level* koperasi, bukti terima barang, kriteria produk, dan harga beli wortel. Aliran barang, aliran uang dan aliran informasi ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan keterkaitan antara desa dan kota dan sebaliknya.

2. Implementasi Supply Chain Financing Pada Wortel di Koperasi AI-Ittifaq

Koperasi Pondok Pesantren AI-Ittifaq mulai menerapkan model pembiayaan SCF sejak tahun 2013. Pada tahun yang sama, BNI dan LSI menjalin kerjasama terkait dengan program SCF dimiliki oleh BNI. Model pembiayaan SCF merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan BNI kepada *supplier* dari nasabah utama BNI, yaitu ritel modern. Pelaksanaan model pembiayaan SCF ini melibatkan kerjasama dengan tiga pihak, yaitu Koperasi Pondok Pesantren AI-Ittifaq sebagai *supplier*, supermarket LSI sebagai *buyer*, dan BNI sebagai lembaga keuangan.



Gambar 5. Peta Aliran Uang Agribisnis Wortel dengan Model SCF

Berdasarkan Gambar 5, dengan adanya SCF dari BNI, jeda waktu pembayaran dari LSI menjadi lebih singkat. Melalui penerapan model SCF ini, Koperasi Al-Ittifaq sudah dapat menerima uang pelunasan LSI yang dibayarkan oleh BNI 3-4 hari setelah *kontra bon*. *Kontra bon* adalah sebuah bukti sah pembelanjaan LSI kepada Koperasi Al-Ittifaq yang digunakan untuk mencairkan uang pelunasan LSI. Singkatnya jeda waktu pembayaran membawa dampak baik bagi kelangsungan usahatani wortel di Koperasi Al-Ittifaq.

Perhitungan SCF Wortel

Perhitungan SCF yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ittifaq pada komoditas wortel adalah sebagai berikut

$$\text{Biaya SCF} = \text{Total Tagihan} - (0,03\% \times \text{lead time pembayaran} \times \text{total tagihan})$$

Keterangan:

- 0,03 % adalah persentase biaya yang ditentukan oleh BNI.
- *Lead time* pembayaran adalah jumlah jeda hari antara tanggal dikeluarkannya *kontra bon* oleh LSI dan tanggal seharusnya LSI membayarkan tagihannya.

Tabel 2. Biaya SCF Wortel Pada Bulan Februari 2016

Minggu Ke-	Total Tagihan LSI	Lead Time	Biaya SCF	Penerimaan Koperasi
1	Rp 330.400	29	Rp 2.874	Rp 327.526
2	Rp 413.000	36	Rp 4.460	Rp 408.540
3	Rp 742.000	29	Rp 6.455	Rp 735.545
4	Rp 581.000	36	Rp 6.275	Rp 574.725
Total	Rp 2.066.400		Rp 20.064	Rp 2.046.336
Rabat (2,5%)	Rp 51.660			

Biaya SCF adalah biaya yang dikenakan oleh BNI kepada Koperasi Al-Ittifaq setiap *kontra bon*. SCF merupakan salah satu skim kredit yang dimiliki oleh BNI, sehingga terdapat biaya potongan yang harus ditanggung oleh koperasi. Berdasarkan Tabel 2, jumlah biaya SCF yang harus dibayar oleh koperasi pada bulan Februari 2016 adalah Rp 20.064 dan terdapat biaya rabat 2,5%. Menurut Ketua Koperasi Al-Ittifaq, jumlah biaya SCF yang dibebankan kepada koperasi tidak terlalu memberatkan karena koperasi dapat menerima uang lebih cepat dan dapat diputar kembali untuk membiayai kebutuhan lainnya.

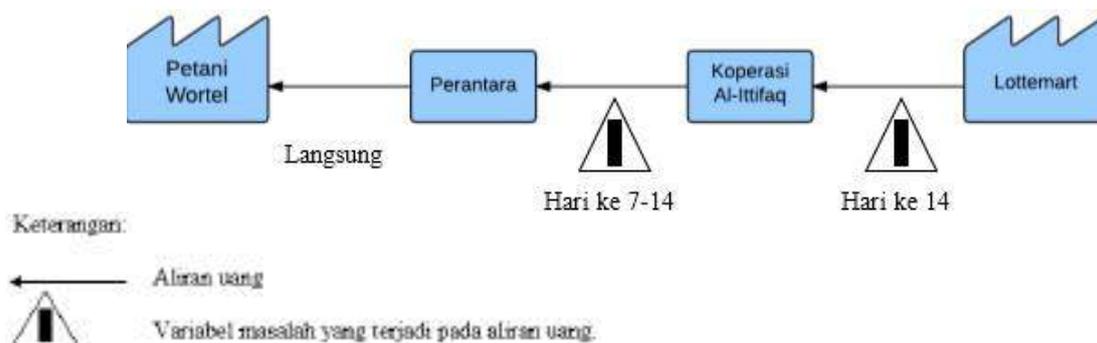
Pada lembar MoU antara Koperasi Al-Ittifaq dan LSI, masa pembayaran LSI kepada Koperasi Al-Ittifaq selama 21 hari setelah *kontra bon* dan dalam satu bulan terjadi dua kali pencairan uang oleh LSI, yaitu pada tanggal 5 dan 20. Namun dengan adanya sistem SCF, koperasi dapat menerima uang pembayaran dari LSI lebih cepat dari biasanya dan tidak perlu menunggu tanggal 5 dan 20 setiap bulannya, karena BNI akan mengirimkan uang pelunasan LSI ke rekening koperasi 3-4 hari setelah *kontra bon*. Semakin singkatnya jeda waktu pembayaran membuat kelangsungan usahatani wortel di Koperasi Al-Ittifaq menjadi lebih lancar, ini sebuah keuntungan yang dirasakan oleh koperasi. Keuntungan lainnya yang didapatkan Koperasi Al-Ittifaq dari sistem SCF ini adalah BNI langsung mengirimkan seluruh uangnya kepada koperasi tanpa dicicil dan tanpa harus menunggu pihak LSI melunasi tagihannya kepada BNI.

Dampak dari Model SCF Terhadap Petani dan Koperasi

Koperasi Al-Ittifaq mempunyai dua gudang, yaitu gudang Bandung dan gudang Jakarta. Gudang yang sudah menerapkan model SCF adalah gudang Bandung, sedangkan gudang Jakarta masih belum menggunakan model tersebut. Gudang Jakarta belum menggunakan model SCF karena dari pihak Lottemart dan Bank BJB belum menerapkan model SCF. Oleh karena itu, untuk menentukan dampak dari model SCF dapat dilakukan dengan cara membandingkan keadaan gudang Bandung dan gudang Jakarta.

Gudang Jakarta

Jenis sayuran yang dikirimkan oleh gudang Jakarta ke Lottemart lebih sedikit, namun jumlah yang dikirimkan lebih banyak dibandingkan dengan gudang Bandung. Lottemart adalah supermarket yang menyediakan berbagai jenis sayuran dalam jumlah besar, karena rata-rata konsumen yang berbelanja ke Lottemart adalah hotel, restoran, kantor, dan *catering*. Begitu pula dengan sayuran wortel, dalam seminggu volume rata-rata permintaan wortel di gudang Jakarta sebesar 735 kg dengan proses pendistribusian yang dilakukan setiap hari.



Gambar 6. Peta Aliran Uang Agribisnis Wortel Tanpa Model SCF

Berdasarkan Gambar 6, masa pembayaran Lottemart kepada Koperasi Al-Ittifaq dilakukan 14 hari setelah *kontra bon*. Jeda waktu selama 14 hari dirasa cukup lama bagi koperasi, karena selama jeda waktu tersebut koperasi tidak mendapatkan pemasukan. Untuk mempertahankan kelangsungan usahatani di Gudang Jakarta, Koperasi Al-Ittifaq harus menyediakan modal dua kali lipat dari biasanya. Setiap minggunya pada hari Sabtu, Koperasi Al-Ittifaq bagian gudang Jakarta melakukan pembayaran produk kepada koordinator. Hal ini lah yang menjadi salah satu kendala yang memberatkan koperasi, karena mereka harus menyediakan uang setiap minggunya untuk melunasi tagihan kepada koordinator. Pembayaran produk ke koordinator terkadang ikut terlambat hingga dua minggu karena koperasi tidak memiliki uang untuk melunasi tagihan. Keterlambatan pembayaran ini biasanya terjadi pada awal-awal bulan, karena pada awal bulan pihak Lottemart melakukan potongan rabat sekitar 6%, sehingga jumlah uang yang diterima oleh koperasi menjadi lebih sedikit dan tidak mencukupi untuk membayar produk ke koordinator. Potongan rabat 6% tentunya memberatkan koperasi, karena potongan tersebut jumlah pendapatan petani menjadi berkurang. Namun demikian peraturan ini tidak bisa diganggu gugat oleh koperasi

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Koperasi Al-Ittifaq untuk melakukan pembayaran produk kepada koordinator secara tepat waktu, salah satunya adalah berdiskusi dengan Lottemart supaya mereka memperpendek jeda waktu pembayaran kepada koperasi. Pihak koperasi juga menawarkan Lottemart untuk menggunakan model SCF, namun mereka belum mau menggunakan karena Bank BJB belum memiliki program SCF.

Dampak Model SCF Terhadap Koperasi dan Petani

Tabel 3. Perbandingan Gudang Bandung dan Jakarta

	Gudang Bandung	Gudang Jakarta
Model pembiayaan	SCF.	Non SCF.
Jeda waktu pembayaran	3 – 4 hari setelah <i>kontra bon</i> .	14 hari setelah <i>kontra bon</i> .
Bank yang digunakan	BNI.	BJB.
Jeda waktu pembayaran kepada koordinator	7 hari.	7 – 14 hari.
Kondisi Gudang	Lebih teratur, rapi, dan bersih.	Kurang bersih.
Manajemen	Terdapat struktur dan pembagian tugas yang jelas.	Masih belum terdapat pembagian tugas yang jelas bagi para santri.
Jumlah komoditas yang dikirimkan	148 jenis.	17 jenis.
Kegiatan produksi	<i>Sortasi, grading, packaging, pengiriman.</i>	Panen, pencucian, <i>sortasi, grading, packaging, pengiriman.</i>

Berdasarkan Tabel 3, gudang Bandung yang menggunakan model SCF terlihat lebih baik bila dibandingkan dengan gudang Jakarta yang tidak menggunakan model SCF. Model SCF membawa dampak baik bagi Koperasi Al-Ittifaq, karena dengan singkatnya jeda waktu pembayaran. Uang pelunasan yang diterima oleh koperasi digunakan untuk operasional dan pengembangan koperasi. Pemasukan dari koperasi juga digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan Pondok Pesantren Al-Ittifaq.

Dari Tabel 3 juga nampak bahwa jeda waktu pembayaran kepada petani dan koordinator pada gudang Bandung adalah tujuh hari dan gudang Jakarta adalah 7-14 hari. Bagi petani dan koordinator yang memasok sayurannya kepada gudang Bandung, jeda waktu tujuh hari tidak terlalu menjadi masalah. Namun bagi petani yang memasok sayuran ke gudang Jakarta menjadi masalah, karena jeda waktu tersebut terlalu lama bagi petani yang hanya memiliki pemasukan dari koperasi. Lamanya jeda waktu pembayaran kepada petani gudang Jakarta menyebabkan beberapa petani tidak mau menjual sayurannya kepada koperasi, sehingga jumlah petani mitra semakin berkurang dan koperasi kesulitan untuk memenuhi permintaan sayuran dari Lottemart.

Penerapan model SCF di Koperasi Al-Ittifaq bagian gudang Bandung memberikan dampak baik bagi petani. Uang pelunasan dari LSI yang diterima lebih cepat dapat digunakan koperasi untuk membantu petani dan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman uang atau yang mau mencairkan uangnya lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Koperasi juga dapat memenuhi sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani. Penerapan model SCF memberikan dampak baik bagi petani dan koordinator, walaupun secara tidak langsung dirasakan oleh petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses bisnis petani wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ialah menanam, memelihara, memanen dan mencuci wortel; adapun proses bisnis pada koordinator ialah sortasi, grading dan mengemas; proses bisnis di koperasi hanya mengirimkan melalui dua saluran, yaitu saluran yang berasal dari koordinator gudang Bandung dan gudang Jakarta. Pemasaran ke Jakarta menggunakan cara pembayaran tunda (jeda) waktu antara 7 sampai 14 hari setelah wortel dikirimkan, adapun untuk pemasaran ke Bandung sudah melai diterapkan model Supply chain financing (SCF). Dari proses bisnis antar pelaku dalam rantai ini menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara desa dan kota.
2. Implementasi dari model SCF di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq membantu koperasi untuk mempersingkat jeda waktu pembayaran tagihan LSI menjadi lebih cepat, yaitu 3-4 hari setelah *kontra bon*. Setiap *kontra bon*, BNI mengenakan biaya sekitar 0,03% dari jumlah tagihan LSI kepada Koperasi Al-Ittifaq. Pemotongan biaya 0,03% tidak memberatkan bagi koperasi dan koperasi merasa sangat terbantu dengan adanya model SCF ini.
3. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan model SCF di Koperasi Al-Ittifaq bagi petani adalah jeda waktu pembayaran dari koperasi kepada petani menjadi lebih singkat bila dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model SCF. Jeda waktu pembayaran kepada petani yang menggunakan model SCF adalah 7 hari, sedangkan jeda waktu untuk petani yang tidak menggunakan model SCF mencapai 14 hari.

Saran

1. Model SCF diharapkan dapat direplikasi di unit usaha agribisnis lainnya dan diterapkan oleh Koperasi Al-Ittifaq kepada seluruh supermarket yang menjadi mitra kerja selama ini, seperti Lottemart, Griya, dan Toserba Yogya.
2. SCF meningkatkan hubungan desa dengan kota melalui kegiatan transaksi pemasaran hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bayu, Kartib. Sulistiyo, Dedi. 2010. "Model Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pemasok ke Peritel Besar." Majalah
- [2] Ilmiah UNIKOM, Volume 10 No 1: 51-64.
- [3] Karyani, Tuti dkk. 2013. "Model Pembiayaan Pra Panen Pada Rantai Pasok Agribisnis Berdasarkan Sistem Produksi Komoditas Cabai Merah dengan Orientasi Pasar Terstruktur." Bandung.LPPM Universitas Padjadjaran.
- [4] Hofmann, E. 2005. Supply Chain Finance: Some Conceptual Insights, Kühne Institut für Logistik (KLOG-

HSG) Universität St.Gallen Dufourstrasse, Wiesbaden.

- [5] Ashari. 2009. "Oprimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor PertanianIndonesia". Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 7 No. 1: 21-42.
- [6] Pujawan,INYoman. 2005. SupplyChainManagement, Edisi Pertama. Guna Widya, Surabaya
- [7] Ling li 2007. Supply chin Management: Concept, techniques and practices enhancing value through collaboration. Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.,Ltd
- [8] Vorst. 2000. Effective Food Supply Chain, Generting Modelling nd Evaluating Supply Chain Scenario. PHd Thesis Wageningen University.
- [9] USAID. 2010. "Value Chain Finance". Melalui http://www.apps.delebridge.net/amap/index.php/Value_Chain_Finance [11/07/11].
- [10] KIT and IIRR. 2010. Value Chain Finance: Beyond Microfiance for Rural Entrepreneurs. Royal Tropical Institute, Amsterdam; and International Institute of Rural Reconstruction, Nairobi.

Lampiran 1. Panitia Pengarah

- Penasehat/Penanggung Jawab** : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA (Rektor Unand)
Dr. Tubagus Furqon Shofani (ASPI)
Dr. Bayu Krisnamurthi (PERHEPI)
- Panitia Pengarah**
- Ketua** : Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc. (PWD PPs Unand)
- Wakil Ketua** Prof. Dr. Rudi Febriamansyah, M.Sc. (Ketua PERHEPI Komda Padang)
- Sekretaris** : Dr. Zednita, S.P., M.Si. (Perhepi Komda Padang)
- Anggota** : Dr. Harif Amali Rivai, SE., M.Si. (Dekan FEUA)
Prof. Dr. ADrimas (Koord Prodi PPn FEUA)
Dr. Ir. Faidil Tanjung (Koord Prodi PWD PPs UA)
Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc.
Dr. Ir. Osmet, M.Sc.
Dr. Hefrizal HanDra
Ferry ADrianus, S.E., M.Si.

Lampiran 2.
Panitia Pelaksana Seminar Nasional

Penanggung Jawab	:	Rektor Universitas Andalas, Padang
Pengarah	:	Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc.(PERHEPI Padang)
Ketua Pelaksana	:	Dr. Ir. Zednita M.Si.
Wakil Ketua		Maramis
Sekretaris		Dr. Faidil Tanjung, M.Si
Bendahara		Ir. Dwi Evaliza, M.Si Rina Sari, S.P, M.Sc
Sekretariat		Dr. Zulvera, S.P., M.Si. (koord.) Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si. Eki Amnur Hadi, S.P Anugrah Sri Widiasyih, S.P Siska Handayani, S.P Nadia Fernalista, S.P Fastabiqul Khairat Budi Ananda Putra
Seksi Acara/Makalah	:	Hasnah, S.P., M.Sc., Ph.D. (koord.) Dr. Ir. Ildal, M.Sc Nuraini Budi Astuti, SP., M.Si Dr. Ayesha Ivonne
Pendanaan dan Sponsor	:	Dr. Ira Wahyuni, MS (Koord) Rika Hariance, SP., M.Si Rafnel Azhari, SP., M.Si Uci Mardiani, ST., MT
Acara	:	Prof. Yonariza, M. Sc (Koord) Afrianingsih, SP. M.Si Cindy Paloma, SP., M.Si Alvindo Dermawan, SP Syajratu Emmal Khairati, SP
Tamu	:	Syahyana Raesi, M.Sc (Koord) Nur Afni Evalia, SP., M.Si Leni Jumiati, Skom., Mkom Salmi
Humas dan Perlengkapan	:	Rian Hidayat, SP., M.Si (Koord) Muhammad HenDri, SP., M.Si Dr. Nofaldi, M.Si Zandri Bayu Satria Syafil Sari Muliadi S.Kom, M. Kom
Konsumsi	:	Dr. Rusda Khairati, M.Si (Koord) Lora Triana, SP., M.Si Yanti Yusnawati

Didukung Oleh :



ISBN : 978-602-73463-1-4

